BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak esensi setiap individu yang harus dipenuhi setiap warga masyarakat dan difasilitasi negara, Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.¹ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.² Dunia pendidikan dituntut untuk selalu berubah lebih progres dalam meningkatkan mutu pendidikan kearah lebih maju, lebih baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pada umumnya, masyarakat menilai mutu pendidikan berdasarkan prosesnya. Oleh karena itu, pemangku kepentingan di bidang pendidikan cenderung lebih mengutamakan perbaikan proses sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah memperkuat Gerakan Literasi Nasional.

¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Indonesia, 2003), hlm. 5.

² Pemerintah Republik Indonesia, hlm. 4.

Gerakan Literasi Nasional (GLN), yang menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diharapkan mampu memacu peningkatan tingkat literasi masyarakat. Program ini diwujudkan melalui Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi Bangsa, serta berbagai program lain yang mendorong aktivitas literasi di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun keluarga.

Hingga saat ini, pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat yang peduli dan berkomitmen terhadap literasi terus berupaya memetakan tingkat aktivitas literasi membaca masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai kajian, baik dalam skala kecil, studi kasus, maupun survei terbatas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran indeks aktivitas literasi membaca masyarakat, baik secara nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Mengingat luasnya makna "literasi" yang berkembang di masyarakat, kajian ini hanya membatasi pada pengertian literasi dalam arti sederhana..

Literasi secara sederhana dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis. Pengertian tersebut berkembang menjadi konsep literasi fungsional, yaitu literasi yang berkaitan dengan berbagai fungsi dan keterampilan hidup. Menurut UNESCO literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis yang terlepas dari konteks dimana keterampilan itu diperoleh dan dari siapa memperolehnya. UNESCO menjelaskan

bahwa kemampuan literasi merupakan hak setiap orang dan merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat.³

Literasi dalam Islam bukanlah istilah baru. Pada 14 abad silam Islam sudah mendorong dan bahkan memerintahkan kewajiban melaksanakan literasi. Kewajiban literasi dalam Islam ini dikenal dengan perintah Tuhan untuk membaca” seperti yang tertera pada wahyu pertama diturunkan kepada nabi muhammad SAW berisikan perintah yang bermakna literasi, yakni Q.S Al-‘Alaq: 96/1⁴

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan!”

Ayat pertama dalam wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW ini berbunyi “Iqra’”, yang berarti “Bacalah.” Hal ini menunjukkan bahwa literasi memiliki peran yang sangat penting. Sebagaimana yang dijelaskan oleh UNESCO, kemampuan literasi dapat membantu memberantas kemiskinan, mengurangi angka kematian anak, mengendalikan pertumbuhan penduduk, menjamin pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan perdamaian.⁵

Betapa pentingnya membaca hingga perintah pertama dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk membaca. Perintah ini sangat *familiar* di kalangan umat

³ Balai Kota Banjarmasin, Satri Darma (materi) di sampaikan dalam seminar Nasional IGI Kalsel ” *Membumikan Karya Guru Melalui Gerakan Literasi Nasional*”. Lounching gerakan Banjarmasin kota literasi., 16 Mei 2018.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 542.

⁵ <http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/>., Diakses 1 Pebruari 2025

Islam, bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar sudah mengenal ayat tersebut. Namun, yang menarik untuk dikaji adalah mengapa perintah membaca menjadi wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Mengapa bukan perintah lain, seperti kewajiban salat, berpuasa, atau berzakat?

Misteri ini mulai terungkap setelah umat Islam mencapai masa kejayaannya pada abad Klasik dan Pertengahan (sekitar tahun 750 M–1258 M). Saat itu, hubungan antara anjuran membaca dengan kemajuan peradaban Islam menjadi sangat relevan. Literasi terbukti menjadi salah satu kunci utama yang mendorong umat Islam unggul dalam ilmu pengetahuan dan membangun peradaban yang gemilang.

Perintah membaca yang disampaikan 14 abad silam tetap menjadi misteri yang menarik untuk dikaji, dipahami, dan diimplementasikan dalam kehidupan, khususnya melalui gerakan membaca. Kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir tidak hanya ditujukan untuk masyarakat Quraisy di Jazirah Arab, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Perannya sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi semesta alam) adalah untuk membangun peradaban yang maju dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh dunia.

Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, perintah membaca bukan sekadar anjuran, tetapi merupakan kewajiban bagi seluruh umat manusia. Literasi adalah kunci utama dalam membangun peradaban dan menjadi landasan bagi ilmu pengetahuan. Tanpa literasi, kemajuan umat manusia tidak akan tercapai.

“Membaca adalah jantungnya pendidikan. Tanpa membaca pendidikan akan mati.” (Dr. Roger Ferr) “Membaca merupakan salah satu fungsi yang

paling penting dalam hidup. Semua proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca.” (Glenn Doman) “Jadi literasi adalah inti atau jantungnya kemampuan siswa untuk belajar dan berhasil di sekolah dan kehidupan selanjutnya.”(Rod Welford, Menteri Pendidikan pendidikan Queensland)⁶

Misteri berikutnya adalah kebijakan fenomenal sekaligus kontroversial yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW setelah Perang Badar, khususnya terkait pengelolaan tawanan perang. Para tawanan yang tidak mampu membayar tebusan diberi tawaran alternatif: mereka diminta mengajarkan kemampuan membaca dan menulis kepada 10 orang di Madinah, baik anak-anak maupun orang dewasa. Jika mereka berhasil melakukannya, mereka akan dibebaskan tanpa harus membayar tebusan.

Kebijakan ini mencerminkan visi besar Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat berbasis literasi. Pada masa itu, dana tebusan sangat dibutuhkan untuk mendukung perjuangan umat Islam. Namun, Nabi SAW justru menetapkan pengajaran membaca dan menulis sebagai prioritas utama, menjadikannya syarat kebebasan bagi para tawanan. Kebijakan ini tidak hanya fenomenal, tetapi juga menunjukkan keberanian dan kejelian Nabi SAW dalam menanamkan pondasi peradaban melalui literasi.

Tawaran untuk menebus diri dengan mengajari penduduk Madinah yang belum pandai membaca dan menulis merupakan kebijakan yang sangat unik dan progresif, terutama jika dilihat dari perspektif kekinian. Kebijakan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kebijakan tersebut

⁶ Satria Darma,dkk, *Menuju Wujud Surabaya Kota Literasi*, (Surabaya:Pelita Hati), 2014, Hal 15

menimbulkan pertanyaan: apa relevansi kemampuan membaca dan menulis di zaman ketika buku masih sangat terbatas? Padahal, pada saat itu, ada pengetahuan dan keterampilan lain yang lebih mendesak, seperti berdagang, berkebun, dan keterampilan praktis lainnya yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Madinah.

Dana tebusan yang berbentuk pembayaran materi mungkin dianggap lebih relevan oleh sebagian orang, terutama bagi negara yang baru berkembang. Namun, Nabi Muhammad SAW memilih untuk memprioritaskan literasi bagi umatnya. Dengan kebijakan ini, keterampilan membaca dan menulis dijadikan sebagai inti dari gerakan literasi pertama dalam sebuah kebijakan negara, yang mencerminkan visi jauh ke depan dalam membangun peradaban umat manusia..

Jawaban atas kebijakan tersebut mulai terungkap setelah seratus tahun kemudian, ketika kemampuan literasi umat Islam mencapai puncak kejayaannya. Investasi literasi berupa kebijakan yang sangat tidak lazim pada masanya ternyata memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan umat Islam. Islam kemudian menguasai dunia selama 8 abad, dengan Dinasti Umayyah di Barat yang menguasai Andalusia (sekarang Spanyol), serta Dinasti Abbasiyah di Baghdad dan Dinasti Fatimiyah di Mesir di Timur.

Zaman kejayaan Islam (sekitar 750 M – 1258 M) merupakan masa ketika para ilmuwan Islam memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya, baik dengan menjaga tradisi yang ada maupun melalui inovasi baru. Kejayaan Islam ini tidak hanya memberikan sumbangsih bagi umat Islam, tetapi juga berkontribusi pada tonggak peradaban dunia. Bahkan,

Presiden Amerika Serikat Barack Obama pernah menyatakan bahwa dunia Barat berutang budi kepada Islam.

Kebangkitan literasi sangatlah penting dan menjadi sebuah keniscayaan. Bangsa yang memiliki kompetensi literasi tinggi akan mengalami kemajuan peradaban yang pesat⁷. Pernyataan ini menegaskan betapa pentingnya literasi bagi kemajuan peradaban suatu bangsa. Konsekuensinya, jika ingin membangun peradaban, budaya literasi harus dibangun dan dibiasakan. Kemajuan sebuah bangsa dan negara dapat dilihat dari kuatnya budaya literasi. Jepang, misalnya, mencapai kemajuan yang luar biasa karena memiliki budaya membaca yang tinggi. Dalam sejarah, kemajuan literasi suatu bangsa terbukti relevan dengan kemajuan peradabannya, seperti yang terjadi pada peradaban Islam di masa lampau.

Dari ilustrasi di atas, Bloom dan Blair menggambarkan dengan pernyataan bahwa, “Rata-rata tingkat kemampuan literasi (kompetensi membaca dan menulis Dunia Islam pada abad pertengahan lebih tinggi dari pada Byzantium dan Eropa. Ini terlihat dari hasil karya tulis ilmunan- ilmunan muslim yang ditemukan di setiap tempat dalam peradaban ini.”⁸

Hal yang sangat tragis dan miris di rasakan pada umat Islam saat ini. Setiap kali komunikasi dengan beberapa orang muslim di lapangan di temui penulis apakah membaca itu merupakan perintah Tuhan sesuai dengan turunnya ayat tersebut hampir semuanya menjawab, “Ya!”. Membaca adalah perintah Tuhan sesuai dengan ayat tersebut. Tapi, jika penulis tanya apakah Anda melaksanakan perintah Tuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Maka jawabnya *hanya tersenyum* dan ketawa kecil dengan malu-malu. Ada konotasi yang dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa

⁷ Wamendekbud Wiendu Nuryanti di Stand Indonesia di Gelaran Frankfurt Book fair (FBF), 10 Agustus 2014.

⁸ Satria Darma di Kutip dari Jonathan Bloom & Sheila Blair, *A Thousand Years of Faith and Power* (London: Yale University Press, 2002), hlm. 105.

kita sebagai umat Islam tidak melaksanakan perintah Tuhan tersebut. Kita mengabaikannya dan tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu hal yang penting dan seakan-akan itu bukan perintah Tuhan.⁹

Sungguh paradoks, seharusnya dengan adanya perintah dan anjuran membaca, umat Islam kini bangkit dari keterpurukan dan maju peradabannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Meskipun hafal surat Iqra' dan membacanya setiap hari dalam salat, aktivitas membaca tidak dijadikan sebagai rutinitas ibadah sebagaimana salat, zakat, zikir, puasa, dan lainnya. Seolah-olah membaca tidak dianggap sebagai perintah atau ajaran Islam. Ironis sekali, perintah Tuhan untuk membaca ditinggalkan dan tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari¹⁰. Inilah tragedi kemunduran umat Islam setelah kejayaannya pada abad klasik dan menengah karena mereka meninggalkan kebiasaan membaca.

Membaca merupakan salah satu kemampuan paling penting dalam hidup, sehingga Allah menjadikannya sebagai perintah pertama, *first commandment* bagi umat Islam. Seluruh proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca. Kemampuan membaca yang tertanam sebagai budaya dan kebiasaan dalam diri setiap peserta didik akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan di sekolah, dalam kehidupan bermasyarakat, serta membuka peluang dan kesempatan menuju kesuksesan yang lebih baik. Farr (1984) menyebutkan bahwa "*Reading is the heart of education*" (Membaca adalah inti pendidikan). Namun, budaya membaca tampaknya hanya dianggap sebagai kewajiban fardhu kifayah atau *social*

⁹ Satria Darma, *Misteri di Balik Perintah Membaca 14 Abad yang Lalu* (Surabaya: Eureka Academia, 2018), hlm. 7.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8.

responsibility, yang jika tidak dilakukan akan menjadi tanggung jawab bersama, bukan sebagai fardhu ain atau kewajiban setiap muslim. Timbul pertanyaan, mengapa umat Islam justru meninggalkan aktivitas ini ?

Membaca adalah fungsi esensial dalam hidup, dan seluruh proses pembelajaran bergantung pada kemampuan membaca. Hal ini sejalan dengan pandangan Glenn Doman dalam bukunya “*How to Teach Your Baby to Read*”.¹¹ Islam sangat menganjurkan umatnya untuk belajar dan berpikir. Bahkan dalam konteks jihad, Islam tetap menganjurkan agar sebagian orang tetap belajar dan memperdalam ilmu. Kecintaan terhadap ilmu pengetahuan adalah karakteristik khas Nabi Muhammad SAW yang membedakannya dari nabi-nabi terdahulu, dan sejak awal beliau telah mengajarkan betapa pentingnya membaca untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW sering bersabda,

“Tinta seorang sarjana lebih suci dari darah para syuhada’, dan berkali-kali mengatakan kepada murid-muridnya perlunya menuntut ilmu ‘bahkan hingga sampai ke negeri China.’ Barangsiapa meninggalkan rumahnya hendak mencari ilmu, makanya ia berjalan di jalan Allah,” Barang siapa meninggalkan rumahnya hendak mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu, Allah akan menunjukkan padanya jalan ke surga..¹²

Al-Qur'an menegaskan bahwa membaca adalah pintu utama untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Apabila perintah ini dijalankan secara konsisten, umat Islam sejatinya dapat menjadi komunitas yang paling literat, melek huruf, dan berilmu di antara bangsa-bangsa lain. Sejarah mencatat bahwa kejayaan peradaban Islam di masa lampau, ketika dunia Barat masih berada dalam kegelapan, bertumpu

¹¹ Glenn Doman, *How to Teach Your Baby to Read*, 1991, hlm. 19.

¹² Syed Ameer, *The Spirit of Islam*, diterjemahkan oleh Margono & Kamilah (Yogyakarta: Navila, t.t.), hlm. 408..

pada budaya literasi yang tinggi. Kemajuan ilmu pengetahuan yang mereka hasilkan menjadi fondasi bagi kemakmuran, kemajuan teknologi, dan perkembangan peradaban dunia hingga kini.

Namun, potret literasi di Indonesia masih jauh dari kondisi ideal tersebut. Data dan studi internasional menunjukkan bahwa minat dan kemampuan membaca masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, berada pada titik yang memprihatinkan. Ironisnya, negara seperti Vietnam yang pernah luluh lantak akibat perang justru berhasil menumbuhkan tradisi literasi yang lebih kuat dan menempatkan generasinya pada posisi terhormat di dunia.

Laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengungkap bahwa budaya membaca masyarakat Indonesia menempati peringkat paling rendah di antara 52 negara di Asia Timur. Temuan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 2011 bahkan lebih mengejutkan: indeks tingkat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya, dari setiap 1.000 penduduk, hanya satu orang yang benar-benar memiliki kebiasaan membaca serius. Kondisi ini berimplikasi langsung pada posisi Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-124 dari 187 negara.

Hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2015 mempertegas realitas ini. Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara, dengan skor membaca hanya naik 1 poin dari 396 menjadi 397 dalam tiga tahun. Skor sains meningkat dari 382 menjadi 403, dan matematika dari 375 menjadi 386, tetapi

capaian ini belum cukup untuk keluar dari posisi sepuluh terbawah dunia. Sebaliknya, Vietnam mampu menembus 20 besar dengan peningkatan signifikan.

Masalah ini bukan hanya terlihat pada level internasional. Rendahnya tingkat literasi di Indonesia juga tercermin dalam hasil Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) atau *Indonesia National Assessment Programme* (INAP), yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa sekolah dasar. Secara nasional, 77,13 persen siswa tergolong kurang dalam kemampuan matematika, 46,83 persen kurang dalam membaca, dan 73,61 persen kurang dalam sains (Panduan GLN 2017, Kemdikbud). Data ini mengindikasikan bahwa persoalan literasi bukan hanya masalah minat baca, tetapi juga kualitas pembelajaran yang belum optimal.

Selain itu, survei yang dilakukan oleh *Central Connecticut State University* menempatkan Indonesia di posisi ke-60 dari 61 negara yang disurvei, hanya sedikit lebih baik dibandingkan Botswana. Kajian ini mengukur tingkat literasi dengan mempertimbangkan berbagai indikator, seperti hasil PISA, jumlah perpustakaan, sirkulasi surat kabar, sistem pendidikan, dan ketersediaan komputer. Posisi ini menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya menghadapi masalah literasi di sekolah, tetapi juga kurangnya ekosistem pendukung literasi di masyarakat luas.¹³

Rendahnya capaian ini memiliki dampak jangka panjang yang serius. Literasi yang lemah akan membatasi kemampuan berpikir kritis, menghambat penguasaan ilmu pengetahuan, dan mempersempit peluang bersaing di tingkat global. Di era ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), negara

¹³ <http://www.ccsu.edu/wmln/methodology.html> diakses pada: 5 Mei 2024.

dengan tingkat literasi rendah akan sulit beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks.

Karena itu, peningkatan literasi harus menjadi prioritas nasional yang tidak bisa ditunda. Dibutuhkan strategi menyeluruh yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, komunitas literasi, media massa, hingga keluarga. Program penguatan literasi perlu mencakup penyediaan bahan bacaan yang relevan dan berkualitas, pembiasaan membaca sejak usia dini, peningkatan kompetensi guru, integrasi literasi dalam kurikulum, serta penciptaan ruang publik yang ramah literasi.

Hanya melalui upaya yang konsisten, terukur, dan berkesinambungan, Indonesia dapat keluar dari krisis literasi. Dengan begitu, membaca tidak lagi menjadi aktivitas yang asing, tetapi bagian dari budaya hidup masyarakat. Literasi yang kuat akan melahirkan generasi yang mampu mengubah informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, dan pemahaman menjadi peradaban yang unggul—sebagaimana pernah dicapai umat Islam pada masa kejayaannya..

Hasil ini sejalan dengan temuan UNESCO dan PISA yang menyoroti rendahnya minat baca dan kemampuan literasi masyarakat Indonesia. Data ini tidak hanya menunjukkan adanya tantangan besar dalam dunia pendidikan, tetapi juga mempertegas perlunya upaya serius untuk meningkatkan budaya membaca dan literasi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

Rendahnya *reading literacy* di Indonesia saat ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga menyulitkan bangsa ini

untuk bersaing di tingkat global. Prof. Iwan Pranoto dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pernah menyatakan bahwa "70 persen anak Indonesia sulit hidup di abad 21." Hal ini disebabkan oleh kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan dampak dari rendahnya minat serta kemampuan membaca dan menulis.¹⁴

Saat ini, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berjumlah sekitar 6,5 juta orang tersebar di 142 negara. Sebagian besar dari mereka berasal dari 392 kabupaten/kota dan hanya mengisi posisi sebagai tenaga kerja kasar yang tidak membutuhkan kemampuan literasi tinggi. Akibatnya, mereka menerima gaji rendah dan sulit meningkatkan taraf hidup.

Tanpa kemampuan literasi yang memadai, SDM Indonesia akan tetap berada di posisi yang lemah dalam persaingan global. Sebagaimana yang diingatkan oleh Soekarno, salah satu pendiri bangsa ini, tanpa upaya serius untuk meningkatkan kemampuan membaca sebagai fondasi belajar dan pengembangan keterampilan hidup bangsa Indonesia berisiko menjadi bangsa yang hanya mampu mengisi pekerjaan kasar. Padahal kita dilarang meninggalkan keturunan yang lemah seperti Firman Allah SWT dalam Al Qur'an.

“Dan hendaklah takut depada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (An-Nisa : 9)¹⁵. Menurut Muhammad Ath-Thahir Ibnu 'Asyur, Lemah dalam ayat ini memiliki makna yang luas, mencakup kelemahan dalam aqidah, syariat, psikis, sosial, maupun ekonomi. Yang dimaksud dzurriyyatan dhi'afa

¹⁴ Pakistyaningsih, dkk, *Menuju Wujud Surabaya Sebagai Kota Literasi*, (Surabaya: Pelita Hati), 2014, hal 20.

¹⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Depag RI, 1979/1980), 437

(keturunan yang lemah) adalah keturunan yang lemah dalam hal ekonomi, ilmu pengetahuan, keagamaan, dan akhlaknya. Ayat ini memerintahkan kita untuk mempersiapkan generasi setelah kita.¹⁶

Mengapa bangsa kita tidak membaca, padahal perintah Allah SWT tentang membaca begitu jelas dan tegas? Hal ini dapat diasumsikan terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Di sisi lain, para pemimpin bangsa tampaknya juga belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya membaca untuk kehidupan dan kemajuan bangsa. Terdapat asumsi keliru bahwa kemampuan membaca adalah sesuatu yang akan terbentuk secara otomatis (*given*) ketika seorang anak bersekolah. Seolah-olah, dengan bersekolah, kemampuan literasi membaca dan menulis akan tumbuh secara alami tanpa perlu usaha yang intensif.

Padahal, asumsi ini tidaklah tepat. Literasi bukan sekadar kemampuan membaca huruf, tetapi mencakup pemahaman, analisis, dan aplikasi informasi dari bahan bacaan. Kemampuan ini membutuhkan pembelajaran yang terstruktur, dukungan lingkungan yang kondusif, dan kebiasaan membaca yang terus-menerus diasah. Tanpa pendekatan yang serius dan sistematis, literasi bangsa tidak akan berkembang sebagaimana mestinya.

Untuk merespons fenomena rendahnya literasi di masyarakat dan sebagai upaya peningkatan literasi nasional, sejak tahun 2016 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan Gerakan Literasi Nasional (GLN). Program ini mencakup tiga komponen utama: *Gerakan Literasi Sekolah (GLS)*, *Gerakan Literasi Keluarga*, dan *Gerakan Literasi Masyarakat*.

¹⁶ Muhammad Ath-Thahir Ibnu 'Asyur, *At-Tahrir wa At-Tanwir*, (Tunis: Dar Sahnun, 1997), hal 252 -253.

GLN bertujuan untuk mendorong tumbuhnya budaya membaca di semua lapisan masyarakat. Salah satu upaya yang menonjol adalah pelaksanaan GLS. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2015 tentang *Penumbuhan Budi Pekerti*, sekolah-sekolah didorong untuk memperkuat budaya literasi siswa. Salah satu bentuk implementasinya adalah kebiasaan membaca buku non-pelajaran selama 15 menit sebelum proses belajar mengajar dimulai/

Kegiatan membaca ini diharapkan mampu menumbuhkan minat baca siswa sekaligus meningkatkan keterampilan membaca mereka. Dengan keterampilan membaca yang lebih baik, siswa dapat menguasai pengetahuan secara lebih optimal, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sepanjang tahun 2016 menunjukkan bahwa sebanyak 5.360 sekolah di berbagai jenjang pendidikan telah berhasil meningkatkan kapasitas literasi dan melaksanakan kegiatan membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jumlah ini belum termasuk sekolah-sekolah yang telah lebih dahulu menerapkan program literasi sebelum peluncuran resmi GLS pada tahun 2016.¹⁷

Namun, tantangan dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) masih cukup besar. Salah satu kendala utama adalah kondisi sarana dan prasarana pendukung program GLS, seperti perpustakaan dan tenaga pengelola perpustakaan

¹⁷ Kilasan Kinerja 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sampai saat ini, jumlah sekolah yang menerapkan GLS belum diketahui dengan pasti

sekolah, yang masih jauh dari memadai. Berdasarkan data, jumlah perpustakaan di jenjang SD mencapai sekitar 61,45 persen dari total sekolah, namun hanya 19 persen di antaranya yang berada dalam kondisi baik. Pada jenjang SMP, tercatat 76,25 persen sekolah memiliki perpustakaan, tetapi hanya 22 persen yang dalam kondisi baik. Sementara itu, pada jenjang SMA, 76,40 persen sekolah memiliki perpustakaan, namun hanya 33 persen dalam kondisi baik. Sedangkan di jenjang SMK, 60,34 persen sekolah memiliki perpustakaan, dan hanya 27 persen yang berada dalam kondisi baik.

Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat posisi perpustakaan di sekolah sangat krusial, baik untuk menunjang proses pembelajaran maupun mendukung keberhasilan program GLS. Idealnya, jumlah perpustakaan sekolah harus sepadan dengan jumlah sekolah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Keberadaan perpustakaan sekolah menjadi semakin penting mengingat jumlah siswa yang dilayani sangat besar. Di tingkat SD, perpustakaan hanya melayani 25,3 juta siswa, di tingkat SMP lebih dari 10 juta siswa, sementara di tingkat SMA sebanyak 4,7 juta siswa, dan di tingkat SMK sekitar 4,8 juta siswa.¹⁸ Angka ini belum termasuk siswa di madrasah maupun pesantren yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, yang juga memerlukan akses literasi melalui perpustakaan.

¹⁸ Data jumlah siswa sebagaimana tercantum di situs <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> diakses pada: 5 Mei 2024.

Tantangan berikutnya adalah ancaman terhadap keberlanjutan pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di sekolah-sekolah yang sudah mengimplementasikan program ini. Program GLS berisiko tidak dapat berjalan secara berkelanjutan jika tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam mengelola perpustakaan sekolah. Sebagai contoh, ketidaktersediaan pasokan bacaan baru dapat membuat siswa kehilangan minat membaca karena merasa bosan dengan koleksi buku yang terbatas. Selain itu, ketiadaan pustakawan yang terlatih dan berdedikasi dapat mengurangi peran dan fungsi perpustakaan sekolah, yang seharusnya berfungsi sebagai pusat literasi yang mendukung keberhasilan program GLS secara maksimal.¹⁹

Kedudukan perpustakaan sekolah sangat krusial baik dalam menunjang proses pembelajaran maupun dalam mendukung Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Idealnya, jumlah perpustakaan sekolah harus sebanding dengan jumlah sekolah (Pasal 23, UU No.43/2007 tentang Perpustakaan). Perpustakaan sekolah memiliki peran penting karena di tingkat SD, keberadaannya melayani 25,3 juta siswa, di tingkat SMP melayani lebih dari 10 juta siswa, SMA melayani 4,7 juta siswa, dan SMK melayani 4,8 juta siswa. Data ini belum termasuk jumlah siswa di sekolah madrasah maupun pesantren yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.

¹⁹ Tim Peneliti Puslitjak Dikbud, 2015, "*Peran Sekolah dalam Menumbuhkan Budaya Baca*," Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 45.

Selain itu, kondisi literasi keluarga dan masyarakat juga menghadapi tantangan serupa, mengingat minimnya jumlah perpustakaan umum dan toko buku. Jika perpustakaan sekolah melayani program literasi di dalam sekolah, maka perpustakaan umum berperan penting dalam memenuhi kebutuhan literasi di luar sekolah, yakni untuk masyarakat umum. Data yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional (*Lakip Perpusnas 2016*) menyebutkan bahwa tingkat ketersediaan perpustakaan secara nasional baru memenuhi 20 persen dari kebutuhan, yakni hanya ada 154.359 perpustakaan dari rasio kebutuhan sebesar 767.951 perpustakaan. Adapun perpustakaan umum, yang diselenggarakan oleh pemerintah mulai dari tingkat pusat, daerah, kecamatan, hingga desa, serta perpustakaan komunitas (Pasal 22 UU No.43/2007 tentang Perpustakaan), baru mencapai 26 persen dari rasio yang dibutuhkan.

Disparitas antara ketersediaan dan kebutuhan perpustakaan umum ini terutama terlihat pada tingkat perpustakaan kecamatan yang baru terpenuhi 8 persen, dan perpustakaan desa yang baru terpenuhi 26 persen dari rasio kebutuhan. Meskipun ketersediaan perpustakaan umum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Kabupaten/Kota) telah mencapai lebih dari 90 persen, hal ini tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan bacaan masyarakat di pelosok, mengingat lokasi perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota umumnya terpusat di daerah perkotaan.²⁰

²⁰ *LAKIP Perpusnas 2016*.

Rendahnya akses masyarakat terhadap bacaan terkonfirmasi melalui hasil survei *Badan Pusat Statistik* (BPS) mengenai persentase penduduk di atas 10 tahun yang mengakses media, khususnya bila dibandingkan dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap televisi. Hal ini menunjukkan kecenderungan berbanding terbalik antara peningkatan akses televisi dengan penurunan akses terhadap surat kabar dan majalah. Persentase penduduk Indonesia yang menonton televisi pada 2009–2015 mencapai lebih dari 90 persen, sementara penduduk yang mendengarkan radio dan membaca surat kabar cenderung menurun. Pada 2009, pendengar radio tercatat sekitar 23,50 persen, namun menurun menjadi 7,5 persen pada tahun 2015. Sementara itu, pembaca surat kabar pada 2009 mencapai sekitar 18,94 persen, namun turun menjadi 13,11 persen pada tahun 2015 (*Statistik Sosial Budaya 2015*). Sedangkan pembaca surat kabar sekitar 18,94 persen di tahun 2009, menjadi 13,11 persen di tahun 2015 (*Statistik Sosial Budaya 2015*).²¹

Berdasarkan tiga parameter di atas, yaitu (1) minimnya akses di sekolah, (2) minimnya akses di masyarakat, serta (3) rendahnya perilaku membaca dibandingkan dengan mengakses media lainnya, menunjukkan kendala yang melatari persoalan literasi masyarakat Indonesia yang sedang dihadapi oleh GLN.

Upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa pemahaman yang jelas tentang peta persoalan literasi tersebut. Tanpa pemahaman ini, capaian hasil program Gerakan Literasi Nasional (GLN) juga akan sulit diukur. Sebagai contoh, Buku Panduan Gerakan Literasi Nasional 2017 dan Peta Jalan

²¹ Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Mengakses Media., *Statistik Sosial Budaya 2015*

Gerakan Literasi Nasional 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tidak menyajikan telaah mengenai kondisi, jumlah, dan persebaran perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum di seluruh Indonesia. Padahal, data mengenai jumlah, kondisi, dan persebaran perpustakaan ini sangat penting sebagai indikator tersedianya akses terhadap bahan-bahan literasi bagi siswa dan masyarakat. Tersedianya akses ini merupakan faktor kunci yang memungkinkan aktivitas literasi dapat dilakukan dengan optimal (Miller dan McKenna, 2016).

Jumlah perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum tentunya hanya salah satu indikator dari sekian banyak faktor yang dapat menggambarkan keberhasilan upaya peningkatan literasi masyarakat. Selain itu, terdapat indikator-indikator lain yang juga perlu ditelaah untuk memberikan gambaran persoalan yang lebih komprehensif. Dengan pemahaman yang lebih utuh, program Gerakan Literasi Nasional (GLN) dan Gerakan Literasi Desa (GLD) dapat dijalankan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Berkaca pada fenomena gerakan literasi nasional di atas, Provinsi Kalimantan Selatan, seperti kebanyakan provinsi lainnya di Indonesia, juga menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan tingkat literasi warganya. Berdasarkan data Indeks Alibaca dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia, Kalimantan Selatan masuk dalam kategori aktivitas literasi rendah. Dari total provinsi yang ada, sebanyak 71% termasuk dalam kategori ini, dengan Kalimantan Selatan berada di peringkat ke-16.

Secara nasional, tingkat literasi di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas provinsi berada dalam kategori aktivitas literasi rendah dengan nilai indeks antara 20,01 hingga 40,00. Tidak ada satu pun provinsi yang mencapai kategori aktivitas literasi tinggi atau sangat tinggi, yang memerlukan nilai indeks antara 60,01 hingga 100,00. Data menunjukkan bahwa hanya 9 provinsi (26%) yang berada dalam kategori aktivitas literasi sedang (40,01–60,00), sementara 24 provinsi (71%) termasuk dalam kategori rendah, dan 1 provinsi (3%) berada dalam kategori sangat rendah (0–20,00).²²Ini menunjukkan bahwa mayoritas provinsi di Indonesia berada pada level aktivitas literasi rendah. Hal ini sejalan dengan capaian Indeks Alibaca Nasional yang juga berada di level aktivitas literasi rendah (angka indeks 37,32). Kalimantan Selatan, dengan indeks literasi yang rendah (angka indeks 37,00), mencerminkan kecenderungan di bawah rata-rata indeks nasional.

Kesimpulan dari data di atas, menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori rendah pada Dimensi Akses dalam hal literasi di sekolah. Ini terlihat dari indikator akses yang mencakup persentase perpustakaan sekolah dalam kondisi baik dan jumlah petugas pengelola perpustakaan sekolah. Di tingkat masyarakat, indikator akses meliputi persentase perpustakaan umum, perpustakaan komunitas, rumah tangga yang membeli surat kabar/koran, dan rumah tangga yang membeli majalah/tabloid. Pada dimensi ini, Kalimantan Selatan berada di posisi ke-14 dari 34 provinsi di Indonesia dengan indeks 21,78.

²² Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi. Cetakan pertama, 2019, hal 57-64.*

Pada Dimensi Alternatif, yang mencerminkan penggunaan perangkat elektronik dan teknologi informasi dalam mengakses sumber literasi, Kalimantan Selatan juga berada dalam kategori rendah dengan indeks 27,38, menempati posisi ke-19 dari 34 provinsi di Indonesia.

Pada Dimensi Budaya, yang merepresentasikan perilaku atau kebiasaan mengakses bahan literasi, termasuk kebiasaan masyarakat dalam membaca surat kabar cetak, media elektronik/internet, serta kunjungan ke perpustakaan dan pemanfaatan taman bacaan (TBM), Kalimantan Selatan juga termasuk dalam kategori rendah. Provinsi ini berada di posisi ke-19 dari 34 provinsi dengan indeks 27,38. Secara keseluruhan, berdasarkan data Indeks Alibaca dari 34 provinsi di Indonesia, Kalimantan Selatan berada dalam kategori aktivitas literasi rendah.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus dalam meningkatkan aktivitas literasi di Kalimantan Selatan. Meningkatkan literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga tentang menyediakan akses yang lebih baik ke sumber daya bacaan dan mengembangkan budaya literasi yang kuat. Ini termasuk meningkatkan ketersediaan perpustakaan, mengadakan berbagai program literasi, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang mendorong minat baca.

Dengan demikian, jelas bahwa Provinsi Kalimantan Selatan membutuhkan strategi dan intervensi khusus untuk meningkatkan tingkat literasi. Pemerintah daerah, bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini dan mendorong peningkatan literasi yang signifikan, terstruktur, sistematis dan efektif. Hanya dengan usaha bersama, Kalimantan

Selatan dapat beralih dari kategori rendah ke tingkat literasi yang lebih tinggi, yang akan berdampak positif pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakatnya.

Tingkat keberbacaan di Kalimantan Selatan perlahan namun pasti mulai mengalami peningkatan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa tingkat melek huruf di provinsi ini telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Namun demikian, tantangan seperti akses terhadap bahan bacaan berkualitas dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala.

Di tengah tantangan ini, berbagai pihak telah menginisiasi program-program literasi yang bertujuan untuk meningkatkan keberbacaan di Kalimantan Selatan. Program-program tersebut meliputi pembangunan perpustakaan, pelatihan literasi bagi pendidik dan masyarakat, serta kampanye literasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat membaca di kalangan anak-anak dan dewasa.

Meskipun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, gerakan literasi di Kalimantan Selatan menunjukkan potensi besar untuk mengubah paradigma keberbacaan di Provinsi ini. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, harapan untuk meningkatkan tingkat literasi dan membuka peluang lebih luas bagi pembangunan di Kalimantan Selatan semakin mungkin terwujud.

Dengan kerja keras dan motto " Kalimantan Selatan Bergerak dan Menggerakkan," Terbukti, Kalimantan Selatan dinobatkan sebagai wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Literasi (IPL) tertinggi se-Indonesia tahun 2021. Berdasarkan data Perpustakaan Nasional (Perpusnas), indeks pembangunan literasi

masyarakat (IPLM) Indonesia mencapai 13,54 poin pada 2021. Angka tersebut naik 0,61 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 12,93 poin. Dari tujuh indikator penyusun IPLM, ketercukupan koleksi perpustakaan memiliki skor tertinggi sebesar 0,08946 poin. Sementara, indikator ketercukupan tenaga perpustakaan memiliki skor terendah, yakni 0,00006 poin.

Berdasarkan wilayahnya, provinsi dengan pembangunan literasi masyarakat tertinggi di Indonesia adalah Kalimantan Selatan. Provinsi tersebut memiliki skor IPLM sebesar 58,13 poin pada 2021. Posisi kedua ditempati oleh Maluku dengan skor IPLM sebesar 35,75 poin. Setelahnya ada Gorontalo yang memiliki skor IPLM sebesar 22,53 poin. Skor IPLM Yogyakarta tercatat sebesar 21,85 poin. Urutan selanjutnya ditempati oleh Kepulauan Riau yang mempunyai skor IPLM sebesar 21,33 poin.²³

Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meraih tiga penghargaan pada ajang Gemilang Perpusnas 2021. Paling membanggakan adalah Kalsel dinobatkan sebagai daerah tertinggi dalam indeks pembangunan literasi skala nasional. Penghargaan diberikan setelah Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI melalui serangkaian uji seleksi profesional menetapkan Kalsel layak meraih tiga penghargaan sekaligus. Berdasarkan data rilis Perpusnas RI, Kalsel tercatat meraih indeks pembangunan literasi peringkat pertama dengan angka 48,7 persen. Skor

²³ <https://dataindonesia.id/varia/detail/pembangunan-literasi-kalimantan-selatan-terbaik-nasional-2021>.di akses tanggal 15 Juni 2023

tersebut mengungguli posisi kedua yaitu Provinsi Bangka Belitung dengan angka 28,83 dan diperingkat ketiga Provinsi Gorontalo dengan angka 28,18 persen.²⁴

Penghargaan pertama diterima Gubernur Kalsel Sahbirin Noor atas indeks pembangunan literasi (IPL) Kalsel tertinggi secara nasional. Kemudian anugerah Nugra Jasa Dharma Pustaloka untuk Kadispersip Prov Kalsel Hj Nurliani serta Nugra Jasa Pustaloka untuk Bupati HSU. Penghargaan ajang Gemilang Perpustnas 2021 merupakan agenda tahunan yang memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi pada kemajuan perpustakaan dan budaya baca di Indonesia oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI.

Penghargaan Perpustnas itu merupakan hasil kolaborasi, kerja bersama dari pemangku kepentingan, komunitas dan dukungan semua lintas sektor. dalam indeks pembangunan literasi (IPL) Kalsel tertinggi secara nasional, sebagai makna dari upaya nyata dalam memajukan literasi dan kecintaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan di Kalimantan Selatan.²⁵

Penghargaan Perpustnas merupakan sebuah motivasi untuk lebih meningkatkan budaya literasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari penelitian keterbacaan Ali Baca, terdapat perbedaan signifikan. Sebelumnya, Kalimantan Selatan berada pada tingkat aktivitas literasi yang rendah pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2021, Kalimantan Selatan mencapai posisi tertinggi secara nasional dalam Indeks Pembangunan Literasi (IPL).

²⁴ <https://news.republika.co.id/berita/qzrlx8423/kalsel-tertinggi-indeks-pembangunan-literasi-nasional> di akses tanggal 15 Juni 2023.

²⁵ Sambutan Gubernur Kalimantan Selatan. saat menghadiri syukuran sederhana, di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kalsel, Jalan Km 6 Banjarmasin, Selasa (21/9)

Capaian literasi yang diraih Provinsi Kalimantan Selatan merupakan hasil dari berbagai inovasi dan revitalisasi yang dilakukan oleh Perpustakaan Wilayah Kalimantan Selatan beserta sejumlah perpustakaan daerah, seperti Perpustakaan Daerah Hulu Sungai Utara (HSU). Keberhasilan ini mencerminkan komitmen dan kolaborasi lintas pihak dalam meningkatkan kualitas layanan dan akses literasi di tingkat kelembagaan. Namun demikian, keberhasilan tersebut sebaiknya tidak berhenti pada lingkup perpustakaan wilayah dan daerah semata, melainkan perlu diperluas hingga ke perpustakaan-perpustakaan sekolah agar dampak positifnya dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa terdapat perbedaan fokus indikator antara Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Indeks Keterbacaan Ali Baca, yang memengaruhi hasil pengukuran capaian literasi di provinsi ini. IPLM lebih menitikberatkan pada ketercukupan koleksi perpustakaan—yang meraih skor tertinggi sebesar 0,08946 poin—serta ketercukupan tenaga perpustakaan—yang justru memperoleh skor terendah sebesar 0,00006 poin. Sebaliknya, riset Pusdiklat Indeks Keterbacaan Ali Baca menyoroti dimensi akses, dimensi alternatif, dan dimensi budaya sebagai tolok ukur utama. Perbedaan pendekatan ini mengindikasikan bahwa meskipun capaian literasi di tingkat kelembagaan relatif tinggi, tantangan literasi pada level masyarakat dan sekolah masih signifikan.

Dalam konteks tersebut, Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dan Gerakan Literasi Madrasah (GLM) memiliki peran strategis sebagai jembatan antara keberhasilan literasi di tingkat kelembagaan dan peningkatan budaya literasi di lingkungan pendidikan. Kedua gerakan ini berfokus pada pembiasaan membaca,

pengayaan bahan bacaan, dan pembelajaran berbasis literasi yang mendorong siswa untuk tidak hanya membaca, tetapi juga memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, pelaksanaan GLS/GLM di berbagai sekolah dan madrasah masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan koleksi buku, kurangnya tenaga pustakawan profesional, serta minimnya ruang baca yang nyaman dan mudah diakses siswa. serta kurangnya pendidikan literasi yang efektif di s Sekolah/madrasah.

Oleh karena itu, integrasi antara keberhasilan perpustakaan daerah dengan program literasi sekolah/madrasah menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa literasi tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar membentuk karakter, meningkatkan daya saing, dan membangun peradaban masyarakat Kalimantan Selatan yang maju.²⁶

Dalam konteks pendidikan, Gerakan Literasi Sekolah/Madrasah di Kalimantan Selatan menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi peserta didik. Gerakan ini melibatkan sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan literasi. Kegiatan GLS/M mencakup peningkatan akses bahan bacaan, pelatihan guru dalam pengajaran literasi, pelaksanaan kegiatan kreatif yang mendorong minat baca, serta pelibatan aktif keluarga dan komunitas.

Penelitian ini berfokus pada implementasi GLS/M di Kalimantan Selatan, khususnya pada sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi dan

²⁶. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *indeks aktivitas. Literasi membaca. 34 provinsi*. Cetakan pertama, April 2019.

madrasah yang dikelola Kementerian Agama Provinsi. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama, serta rekam jejak prestasi di media. Enam sekolah/madrasah unggulan yang dipilih adalah SMAN 1 Banjarmasin, SMAN 7 Banjarmasin, MAN 2 Kota Banjarmasin, SMAN 1 Banjarbaru, MAN 4 Banjar, dan SMAN 1 Martapura. Seluruh sekolah ini berakreditasi A, memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang signifikan, serta sebagian telah bersertifikasi ISO.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam pelaksanaan GLS/M di Kalimantan Selatan, termasuk strategi yang digunakan, tantangan yang dihadapi, dan inovasi yang dilakukan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan literasi yang lebih efektif dan kontekstual di tingkat provinsi maupun nasional.

Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai "*Gerakan Literasi Sekolah/Madrasah di Kalimantan Selatan.*" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya literasi dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, serta melihat potensi besar yang dimiliki oleh Gerakan Literasi Sekolah/Madrasah (GLS) dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan. Dengan meningkatnya minat baca dan keterampilan literasi siswa, diharapkan dapat tercipta budaya literasi yang tidak hanya berkembang di lingkungan sekolah, tetapi juga di masyarakat secara luas.

Penulis juga menyadari bahwa meskipun Gerakan Literasi Sekolah/Madrasah telah diterapkan di berbagai sekolah dan madrasah, masih

banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan dan kinerja gerakan literasi ini diimplementasikan, tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan, serta solusi atau strategi yang diterapkan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Gerakan Literasi Sekolah/Madrasah di Kalimantan Selatan.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi, kinerja, dan tantangan dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah /Madrasah madrasah di Kalimantan Selatan. Fokus tersebut dijabarkan dalam tiga pertanyaan penelitian utama:

1. Bagaimana implementasi Gerakan Literasi Sekolah /Madrasah madrasah di Kalimantan Selatan?

Fokus pertanyaan ini adalah untuk menggali sejauh mana kebijakan, program, dan langkah-langkah literasi diintegrasikan dalam lingkungan sekolah/madrasah, serta sejauh mana literasi menjadi bagian dari budaya pembelajaran.

2. Bagaimana kinerja sekolah/madrasah dalam pelaksanaan GLS ditinjau dari klasifikasi tahapan Gerakan Literasi Sekolah (pembiasaan, pengembangan, pembelajaran)?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan GLS serta mengklasifikasikan posisi atau tahap keterlaksanaan GLS di masing-masing sekolah/madrasah.

3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah, dan bagaimana strategi yang diterapkan untuk mengatasinya?

Pertanyaan ini mengarahkan penelitian pada identifikasi kendala baik struktural maupun kultural yang menghambat efektivitas GLS, serta menggali strategi yang diterapkan oleh sekolah/madrasah, termasuk strategi kebijakan (*Power Policy*) dan *Strategi Sinkol* (Sinergi dan Kolaborasi) dalam membangun ekosistem literasi.

C. Tujuan Penelitian

Sejak diluncurkannya program Gerakan Literasi Nasional (GLN) melalui Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, Gerakan Literasi Sekolah (GLS) telah menjadi strategi nasional dalam menumbuhkan budaya literasi di lingkungan pendidikan. Namun, pelaksanaannya masih menunjukkan variasi yang signifikan, terutama di tingkat daerah.

Bertolak dari latar belakang dan fokus masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan mengevaluasi efektivitas Gerakan Literasi Sekolah sekolah /madrasah di Kalimantan Selatan, guna memahami tingkat implementasi, mengklasifikasikan posisi sekolah dalam tahapan GLS, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi yang diterapkan dalam pelaksanaannya.

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Mendeskripsikan implementasi GLS dari aspek kebijakan, program, prosedur, dan keterlibatan pemangku kepentingan.

2. Memetakan kinerja literasi di masing-masing sekolah/madrasah berdasarkan tahapan Gerakan Literasi Sekolah (tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran), serta mengidentifikasi *best practices* dan potensi yang dimiliki oleh sekolah/madrasah dalam mendorong GLS.
3. Mengungkap hambatan struktural dan kultural, serta strategi penguatan melalui pendekatan *Power Policy* dan *Sinkol* (Sinergi dan Kolaborasi) untuk keberlanjutan gerakan literasi..

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuaan tentang Gerakan Literasi Sekolah di Kalimantan Selatan. Kajian ini akan digunakan dan dapat dikembangkan secara praktis berdasarkan landasan konseptual yang relevan serta kenyataan empiris di lapangan terutama keinginan dan harapan masyarakat. Sehingga memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian dalam mengembangkan teori dalam bidang Gerakan literasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui budaya membaca di Kalimantan Selatan untuk menjadi Provinsi Literasi .

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat (Kemdikbud dan Kemenag RI), penelitian terkait Gerakan Literasi Sekolah di Kalimantan Selatan dapat menjadi pedoman untuk mengevaluasi dan merencanakan program

literasi yang lebih tepat dan terarah, mengingat sejauh ini perencanaan dan pelaksanaan program literasi belum berlandaskan data empiris (*evidence-based*). Penelitian ini juga dapat menjadi masukan penting, khususnya bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mewujudkan Kalimantan Selatan sebagai Provinsi Literasi guna meningkatkan mutu pendidikan melalui budaya membaca.

- b. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, penelitian terkait Gerakan Literasi Sekolah di Kalimantan Selatan dapat memberikan gambaran tentang tingkat aktivitas literasi di sekolah-sekolah atau madrasah di daerah tersebut, serta perbandingannya dengan daerah atau provinsi lain yang telah lebih lama melaksanakan program literasi sekolah. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu didorong untuk meningkatkan aktivitas literasi di sekolah-sekolah.
- c. Bagi pemerintah pusat dan daerah yakni Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, hasil penelitian ini menjadi referensi untuk melakukan kebijakan tentang gerakan membaca non buku pelajaran di sekolah/Madrasah
- d. Bagi kalangan akademisi dan pemerhati pendidikan terkait dengan isu literasi, Gerakan Literasi Sekolah di Kalimantan Selatan dapat menjadi titik tolak guna telaah lebih lanjut mengenai dinamika dan perkembangan literasi sekolah di Indonesia
- e. Bagi pegiat dan aktivis literasi, indeks ini dapat menjadi pemacu guna mendorong dan mengawal upaya untuk meningkatkan aktivitas literasi

di sekolah maupun daerah kabupaten kota di Kalimantan Selatan masing-masing.

- f. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk peneliti berikutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk memastikan kejelasan makna dari istilah-istilah kunci dalam penelitian ini serta menyinergikannya dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka definisi operasional berikut dirancang secara spesifik agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan dan analisis data:

1. Implementasi Gerakan Literasi Sekolah/Madrasah

Yang dimaksud dengan implementasi Gerakan Literasi Sekolah/Madrasah dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan kebijakan, program, dan aktivitas literasi di sekolah/madrasah dalam kerangka Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Hal ini mencakup:

- keberadaan dan peran tim literasi sekolah,
- kebijakan sekolah/madrasah yang mendukung literasi,
- integrasi kegiatan literasi dalam kurikulum dan rutinitas harian,
- peran perpustakaan dan sumber belajar,
- serta partisipasi warga sekolah (guru, siswa, dan tenaga kependidikan) dalam kegiatan literasi.

Implementasi ini dievaluasi berdasarkan sejauh mana sekolah/madrasah menjalankan prinsip-prinsip GLS sebagaimana

dijabarkan dalam panduan resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia²⁷.

2. Kinerja Gerakan Literasi Sekolah/Madrasah Berdasarkan Tahapan

Kinerja dalam konteks ini merujuk pada capaian dan efektivitas pelaksanaan program GLS di sekolah/madrasah yang dikaji berdasarkan tiga tahapan utama yang ditetapkan dalam panduan Gerakan Literasi Sekolah.²⁸ Tahapan ini menggambarkan perkembangan kegiatan literasi mulai dari pembiasaan awal hingga integrasi penuh ke dalam proses pembelajaran sebagaimana di uraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.1.1 Gerakan Literasi Sekolah/Madrasah Berdasarkan Tahapan

No	Tahapan	Deskripsi	Fokus Utama
1	Pembiasaan	Penanaman kebiasaan membaca dan aktivitas literasi ringan secara rutin, seperti membaca 15 menit sebelum belajar.	Menumbuhkan minat dan membentuk kebiasaan membaca.
2	Pengembangan	Pelaksanaan kegiatan literasi terstruktur yang mendorong keterampilan berpikir kritis, analitis, dan ekspresif, baik reseptif maupun produktif.	Peningkatan keterampilan literasi secara mendalam.
3	Pembelajaran	Integrasi literasi dalam pembelajaran lintas mata pelajaran dengan pendekatan tematik dan berbasis proyek.	Penerapan literasi untuk pemecahan masalah, kolaborasi, dan inovasi.

²⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar dan Menengah*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2016.

²⁸ Kemendikbud. *Buku Saku Literasi Sekolah*. Jakarta: Direktorat Pembinaan SMP, 2017

3. Tantangan dan Strategi dalam Pelaksanaan GLS

Tantangan yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup berbagai hambatan yang dihadapi sekolah/madrasah dalam mengimplementasikan GLS, baik yang bersifat struktural (misalnya: ketiadaan tim literasi, keterbatasan pustakawan, minimnya fasilitas) maupun kultural (seperti: rendahnya minat baca siswa, lemahnya dukungan orang tua, atau dominasi media sosial)²⁹.

Strategi dalam konteks ini mengacu pada pendekatan yang diterapkan sekolah/madrasah untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam penelitian ini, dua pendekatan utama yang dijadikan fokus adalah:

- **Strategi *Power Policy***: penguatan melalui regulasi dan kebijakan yang bersifat top-down, misalnya melalui SK kepala sekolah, peraturan daerah, atau dukungan dari pemerintah daerah.
- **Strategi *Sinkol (Sinergi dan Kolaborasi)***: pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (sekolah, orang tua, masyarakat, dunia usaha) dalam membangun budaya literasi secara partisipatif dan berkelanjutan³⁰

4. Sekolah/Madrasah di Kalimantan Selatan

Yang dimaksud dengan sekolah/madrasah di Kalimantan Selatan dalam penelitian ini adalah lembaga pendidikan formal jenjang menengah atas (SMA dan MA) yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan

²⁹ Hasil penelitian lapangan (2025); lihat juga: UNESCO. *Education for All Global Monitoring Report: Literacy for Life*. Paris: UNESCO, 2006

³⁰ Muhammad, H. (2016). *Gerakan Literasi Sekolah: Membangun Budaya Literasi Sejak Usia Dini*. Jakarta: Kemendikbud

Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini difokuskan pada enam sekolah/madrasah yang menjadi lokasi studi kasus, yaitu:

- Kota Banjarmasin: SMAN 1 Banjarmasin, SMAN 7 Banjarmasin, MAN 2 Kota Banjarmasin.
- Kota Banjarbaru: SMAN 1 Banjarbaru.
- Kabupaten Banjar: SMAN 1 Martapura dan MAN 4 Banjar.

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan *Gerakan Literasi Sekolah/Madrasah se-Kalimantan Selatan* adalah suatu bentuk implementasi gerakan sosial di lingkungan pendidikan yang mencakup serangkaian langkah strategis, kebijakan kelembagaan, program, dan prosedur literasi yang dirancang dan dijalankan oleh sekolah dan madrasah. Tujuan utamanya adalah untuk membangun budaya literasi yang kuat, berkelanjutan, dan menyatu dalam ekosistem pembelajaran.

Kinerja gerakan ini diukur berdasarkan efektivitas pelaksanaannya, yang ditinjau melalui keberhasilan sekolah/madrasah dalam mengimplementasikan tiga tahapan Gerakan Literasi Sekolah, yaitu:

- Tahap Pembiasaan, yang menekankan pada rutinitas literasi dasar (seperti membaca 15 menit sebelum pelajaran),
- Tahap Pengembangan, yang mencakup kegiatan literasi yang mulai diarahkan untuk mendukung berpikir kritis dan keterampilan komunikatif,
- dan Tahap Pembelajaran, yaitu tahap integrasi literasi secara menyeluruh dalam proses belajar mengajar lintas mata pelajaran.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan menilai sejauh mana ketiga tahapan tersebut berjalan sesuai dengan panduan nasional, serta sejauh mana hasil-hasil yang diharapkan—baik secara kognitif, afektif, maupun kultural—dapat tercapai.

Lebih jauh, transformasi Gerakan Literasi Sekolah/Madrasah juga tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kapasitas pustakawan, infrastruktur literasi yang belum memadai, serta kurangnya partisipasi dari orang tua dan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan strategi implementasi yang adaptif dan kolaboratif, antara lain melalui:

- *Strategi Power Policy*, yang menekankan pada penguatan kebijakan formal dari tingkat sekolah hingga pemerintah daerah, dan
- *Strategi Sinkol* (Sinergi dan Kolaborasi), yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem literasi yang inklusif, terstruktur, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Dengan demikian, gerakan literasi di sekolah/madrasah bukan hanya menjadi kegiatan rutin semata, melainkan bagian integral dari transformasi budaya belajar, yang menempatkan literasi sebagai pondasi utama dalam pembentukan karakter dan peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Selatan..

F. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun disertasi ini, penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan konseptual dan perbandingan kajian.

Studi-studi tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika literasi, baik dari aspek teoritis maupun praktis, di berbagai jenjang dan pendekatan pendidikan. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Djepri E. Hulawa dalam disertasinya yang berjudul “*Literasi Abad 21 Dalam Perspektif Islam dan Implikasinya terhadap Pembentukan Kompetensi dan Kualitas Karakter Peserta Didik*” (2021), menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini memaparkan konsep literasi abad ke-21 dari sudut pandang Islam serta relevansinya terhadap pembentukan karakter peserta didik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, yaitu literasi. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus kajiannya. Djepri lebih menekankan pada aspek normatif-konseptual, sedangkan penulis menelaah aspek implementatif gerakan literasi sekolah di wilayah Kalimantan Selatan.³¹

Kedua, Wendri Wiratsiwi melalui artikelnya yang berjudul “*Penerapan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar*” (2020), menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Gugus 01, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Fokus utama kajiannya adalah pada pelaksanaan Gerakan Literasi

³¹ Djepri E. Hulawa, *Literasi Abad 21 Dalam Perspektif Islam dan Implikasinya terhadap Pembentukan Kompetensi dan Kualitas Karakter Peserta Didik* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

Sekolah (GLS). Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam hal tema, yakni implementasi gerakan literasi di satuan pendidikan. Akan tetapi, ruang lingkup dan objeknya berbeda, karena Wendri meneliti pada jenjang pendidikan dasar, sementara penulis memfokuskan kajian pada jenjang menengah atas (SMA/MA) di Kalimantan Selatan.³²

Ketiga, disertasi yang ditulis oleh Fida Chasanatun berjudul “*Pengembangan Model Pembelajaran Literasi Dini Berbasis Society-Based Early Literacy Program (SBELP) bagi Anak Usia Dini*” (2019), menggunakan metode penelitian gabungan (*mixed methods*) yang mengacu pada model pengembangan Akker. Penelitian ini menitikberatkan pada pengembangan model pembelajaran literasi pada anak usia dini yang berbasis masyarakat. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada tema literasi. Namun, perbedaannya terletak pada jenjang pendidikan, pendekatan penelitian, dan keluaran yang dihasilkan. Penelitian Chasanatun berorientasi pada pengembangan model, sementara penelitian penulis lebih kepada analisis implementasi gerakan yang telah berjalan.³³

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Fadly dalam disertasinya yang berjudul “*Strategi Pengembangan Literasi Sekolah di Era Digital*”(2022) juga memberikan kontribusi penting dalam memahami gerakan

³² Wendri Wiratsiwi, “Penerapan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar,” *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 10, No. 1 (2020).

³³ Fida Chasanatun, *Pengembangan Model Pembelajaran Literasi Dini Berbasis Society-Based Early Literacy Program (SBELP) bagi Anak Usia Dini* (Disertasi, Universitas Sebelas Maret, 2019).

literasi sekolah. Fadly menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa sekolah menengah di Jawa Timur. Penelitian ini fokus pada pemanfaatan teknologi dalam mendukung gerakan literasi dan dampaknya terhadap keterampilan literasi digital siswa. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu literasi sekolah. Perbedaannya adalah pada konteks digitalisasi literasi, yang menjadi tema sentral dalam penelitian Fadly, sementara penelitian ini menekankan pada aspek budaya literasi di Kalimantan Selatan dan pelibatan pemangku kepentingan dalam implementasi GLS.³⁴

Kelima, Komariah et al. (2023) melalui artikelnya “The Implementation of Post-Covid-19 Pandemic School Literacy in Senior High Schools” yang diterbitkan di *International Journal of Instruction* mengkaji penerapan GLS di SMA Negeri Sukabumi pasca-pandemi Covid-19. Hasilnya menunjukkan bahwa tahap habituasi dan pengembangan berlangsung efektif melalui program seperti membaca 15 menit, pemanfaatan perpustakaan digital, dan review buku, namun tahap pembelajaran belum optimal karena keterbatasan pemahaman guru dan fasilitas pendukung.³⁵

Keenam, Simarmata & Sulistyaningrum (2023) dalam *Asian Journal of Applied Education* melalui kajian literatur dari delapan artikel relevan menemukan bahwa implementasi GLS secara nasional berlangsung positif dan

³⁴ M. Ali Fadly, *Strategi Pengembangan Literasi Sekolah di Era Digital* (Disertasi, Universitas Negeri Surabaya, 2022).

³⁵ Komariah, K., Sauri, S., Mulyana, Y., & ... (2023). *The implementation of post-Covid-19 pandemic school literacy in senior high schools. International Journal of Instruction, 16(3), 299–318. <https://doi.org/10.29333/iji.2023.16317a>*

memiliki potensi besar dalam meningkatkan literasi siswa, selaras dengan tujuan Kurikulum 2013.³⁶

Ketujuh, Lestari, Gufron, & Surjono (2024) dalam *Journal of Curriculum and Teaching* menggunakan pendekatan fenomenologis untuk menggali pengalaman guru SMP dalam melaksanakan GLS. Studi ini mengungkap berbagai tantangan seperti pelaksanaan yang belum menyeluruh, keterbatasan pemahaman guru, beban kerja tinggi, rendahnya minat baca siswa, serta kurangnya pelatihan dan fasilitas pendukung.³⁷

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa belum terdapat kajian yang secara khusus membahas implementasi Gerakan Literasi Sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan, baik pada jenjang SMA maupun MA. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan literatur dalam konteks tersebut. Gerakan Literasi Sekolah sebagai program nasional yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, merupakan amanat pemerintah yang harus dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan, termasuk di Kalimantan Selatan.

Penelitian ini akan memfokuskan kajian pada pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah di beberapa sekolah dan madrasah di Kalimantan Selatan,

³⁶ Simarmata, S. A., & Sulistyningrum, E. (2023). *The implementation of school literacy movement: A literature review*. *Asian Journal of Applied Education*, 2(3), 77–86. <https://doi.org/10.5555/ajae.2023.02.03.77>

³⁷ Lestari, D. A., Gufron, A. M., & Surjono, H. D. (2024). *Teachers' experiences in implementing the School Literacy Movement (GLS)*. *Journal of Curriculum and Teaching*, 13(2), 90–102. <https://doi.org/10.5430/jct.v13n2p90>

seperti SMAN 1 Martapura, SMAN 1 Banjarmasin, SMAN 7 Banjarmasin, SMAN 1 Banjarbaru, MAN 4 Banjar, dan MAN 2 Banjarmasin. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan gerakan tersebut, termasuk pola pelibatan para pemangku kepentingan pendidikan (kepala sekolah, guru, orang tua, komite sekolah, serta mitra eksternal seperti CSR dan masyarakat).

G. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini direncanakan dibagi menjadi Enam bab yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan yang berisi ; Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Mamfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Kajian pustaka terdiri dari : Memahami Literasi Literasi Dalam Islam, Panduan Gerakan Literasi Sekolah , dan Kebijakan Pendidikan Literasi.

Bab III : Metode penelitian yang terdiri dari: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian , data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : memaparkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah/Madrasah di Kalimantan Selatan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori yang

relevan, untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dinamika literasi di satuan pendidikan. Fokus utama pembahasan meliputi tiga aspek, yaitu: (1) implementasi GLS di Kalimantan Selatan, (2) kinerja pelaksanaan GLS, dan (3) tantangan serta strategi dalam mengembangkan gerakan literasi di sekolah dan madrasah.

Bab V : Menyajikan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dalam perspektif teoritis dan konseptual. Analisis dilakukan melalui proses penafsiran data secara mendalam, dengan mengintegrasikan temuan empiris dengan teori-teori yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami makna di balik pelaksanaan Gerakan Literasi sekolah/madrasah di Kalimantan Selatan secara komprehensif, serta untuk menilai kesesuaian atau perbedaan antara realitas di lapangan dengan kerangka teori yang digunakan.

Pembahasan ini mencakup penguatan teori, klarifikasi konsep, dan kemungkinan rekonstruksi teori baru berdasarkan temuan-temuan khas di lapangan. Dalam pendekatan kualitatif, analisis ini berfungsi sebagai jembatan antara data dan pemaknaan ilmiah yang memperkaya khazanah keilmuan di bidang literasi pendidikan.

Secara sistematis, pembahasan dalam bab ini disusun berdasarkan tiga fokus utama, yaitu: Analisis Implementasi GLS di Kalimantan Selatan, Analisis Kinerja GLS di Kalimantan Selatan dan Analisis Tantangan dan Strategi Implementasi GLS.

Bab VI : Penutup berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan intisari dari hasil penelitian yang merangkum temuan utama mengenai implementasi, kinerja, serta tantangan dan strategi GLS di Kalimantan Selatan. Dan Saran atau rekomendasi diberikan sebagai kontribusi konstruktif untuk pengembangan GLS ke depan, baik bagi pemangku kebijakan, praktisi pendidikan, maupun peneliti selanjutnya.